

landasan kemandirian masyarakat berupa institusi masyarakat yang representatif, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan pondasi kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya (secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM) dibentuk berdasarkan kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat.

Di setiap Kelurahan/Desa, BKM dan warga telah menyusun PJM Pronangkis secara partisipatif, sebagai prakarsa menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok-kelompok peduli setempat.

Mempertimbangkan perkembangan positif tersebut, Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dengan P2KP sebagai salah satu motor penggerak. Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat pada dasarnya merupakan Program Payung (umbrella policy) untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk P2KP sebagai salah satu motornya.

Untuk itu pada tahap awal, Program ini dilaksanakan dengan memperluas jangkauan cakupan wilayah program pemberdayaan masyarakat (khususnya P2KP), yang pada tahun 2006 baru mencapai 46 % dari seluruh kecamatan di Indonesia, dapat ditingkatkan hingga menjangkau seluruh kecamatan Indonesia yang mencapai 5.623 kecamatan pada akhir tahun 2009.

#### **KONSEP P2KP TENTANG AKAR PENYEBAB KEMISKINAN**

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimulai pada tahun 1999, pada awalnya dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan sebagai akibat krisis ekonomi tahun 1997 -1998 dan kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi.

Pendekatan P2KP dilandasi oleh kesadaran bahwa akar masalah kemiskinan dan kurangberhasilan dalam pembangunan adalah akibat kondisi masyarakat yang belum berdaya. Ketidakberdayaan tercermin dalam sikap